

Manajemen Nilai Pemangku Kepentingan di Perusahaan Publik vs. Privat: Pendekatan Kualitatif

Yohan Purnawan¹, Melisa Nur Asima Sidabutar², Julina Purba³

^{1, 2, 3} Universitas Efarina, Indonesia

*Email Corresponding Author: yohanpurnawan@gmail.com

Whatsapp Corresponding Author (hanya untuk kepentingan editorial): 082122288997

ABSTRAK (Bahasa Indonesia)

Penelitian ini mengkaji manajemen nilai pemangku kepentingan pada perusahaan sektor publik dan sektor privat melalui pendekatan kualitatif. Latar belakang penelitian menyoroti meningkatnya tuntutan transparansi dan tata kelola yang baik dalam konteks Indonesia, yang memengaruhi bagaimana organisasi mengelola serta menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Tujuan penelitian adalah menganalisis strategi keterlibatan pemangku kepentingan pada kedua sektor, mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam tujuan organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, sumber dana, serta akuntabilitas, sekaligus mengevaluasi efektivitas strategi terhadap penciptaan nilai jangka panjang (keuangan, sosial, dan lingkungan). Data diperoleh melalui studi literatur dan dianalisis menggunakan teknik tematik dan konten, disertai triangulasi untuk menjaga validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor privat cenderung berorientasi pada penciptaan nilai ekonomi dengan strategi berorientasi pasar seperti program loyalitas, hubungan investor, dan kolaborasi rantai pasokan, sedangkan sektor publik lebih menekankan penciptaan nilai sosial melalui konsultasi publik, transparansi, dan kolaborasi lintas lembaga. Perkembangan teknologi digital juga berperan sebagai pendorong efisiensi dan efektivitas keterlibatan di kedua sektor, meskipun mekanisme evaluasi serta respon terhadap umpan balik cenderung berbeda karena karakter institusional. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kinerja manajemen nilai pemangku kepentingan di era digital dan globalisasi.

Kata kunci: Manajemen nilai, pemangku kepentingan, perusahaan publik, perusahaan privat, keterlibatan ESG

ABSTRACT (Bahasa Inggris)

This study examines stakeholder value management in public and private sector organizations using a qualitative approach. The research is grounded in the growing demand for transparency and good governance in the Indonesian context, which shapes how organizations manage and create value for stakeholders. The study aims to analyze stakeholder engagement strategies in both sectors, identify differences and similarities in organizational objectives, decision-making mechanisms, funding sources, and accountability, and evaluate the effectiveness of these strategies in generating long-term value (financial, social, and environmental). Data were collected through systematic literature study and analyzed using thematic and content analysis, supported by triangulation to ensure validity. The findings indicate that private sector organizations generally focus on creating economic value through market-oriented approaches such as customer loyalty programs, investor relations, and supply-chain collaboration. In contrast, public sector organizations prioritize social value through public consultation, transparency, and cross-institution collaboration. Digital technology also serves as a key driver for improving engagement efficiency and effectiveness in both sectors, although evaluation and responsiveness to feedback tend to differ due to institutional characteristics. The study provides practical recommendations to strengthen stakeholder value management performance in the digital and globalization era.

Keywords: Value management, stakeholders, public companies, private companies, ESG engagement

1. PENDAHULUAN

Manajemen nilai pemangku kepentingan merupakan konsep yang semakin krusial bagi keberlangsungan dan keberhasilan sebuah organisasi, baik di sektor publik maupun sektor privat. Dalam konteks Indonesia, isu pengungkapan akuntansi menjadi semakin relevan seiring meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan tata kelola yang baik, baik di sektor publik maupun sektor privat (Sari & Nugroho, 2023). Peningkatan kompleksitas operasional dan

tuntutan akan transparansi serta akuntabilitas, perusahaan dituntut untuk tidak hanya mengutamakan keuntungan semata, melainkan harus mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan pemangku kepentingan. Penelitian ini berfokus pada analisis komparatif terhadap manajemen nilai pemangku kepentingan antara perusahaan publik dan privat dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kedua jenis organisasi tersebut mengelola dan menciptakan nilai bagi berbagai pihak yang berkepentingan, serta strategi apa saja yang mereka terapkan dalam meningkatkan kontribusi nilai tersebut.

Dalam laporan ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam strategi dan praktik terbaik yang diterapkan oleh kedua sektor. Pendekatan kualitatif dinilai mampu menangkap dinamika tersebut secara lebih mendalam (Sugiyono, 2022). Berbagai literatur dan studi kasus yang telah dipublikasikan akan diintegrasikan guna memberikan gambaran yang komprehensif tentang perbedaan, persamaan, serta tantangan yang dihadapi. Seiring dengan dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, manajemen pemangku kepentingan menjadi aspek yang tidak bisa dipisahkan dari strategi organisasi modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman teknis pengungkapan akuntansi, tetapi juga memperkaya perspektif teoretis dengan menempatkan akuntansi sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh nilai, kepentingan, dan perilaku pelakunya, sejalan dengan pandangan Harahap (2020) yang menegaskan bahwa akuntansi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan perilaku individu yang menjalankannya.

Dalam beberapa dekade terakhir, adanya pergeseran paradigma dalam manajemen organisasi telah menempatkan pemangku kepentingan sebagai pusat perhatian. Secara tradisional, teori manajemen berfokus pada pencapaian keuntungan bagi pemegang saham, terutama dalam sektor privat. Namun, munculnya berbagai krisis, tuntutan transparansi, serta perubahan nilai-nilai sosial mendorong kedua sektor—publik dan privat—untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua pemangku kepentingan.

Sektor publik dan sektor privat memiliki karakteristik, tujuan, serta lingkungan regulasi yang berbeda, sehingga praktik pengungkapan akuntansinya tidak dapat diseragamkan secara mutlak. Organisasi sektor publik berorientasi pada pelayanan masyarakat dan akuntabilitas penggunaan dana publik, sedangkan sektor privat lebih menitikberatkan pada penciptaan nilai ekonomi dan keberlanjutan usaha. Perbedaan orientasi ini memengaruhi cara manajer memandang pentingnya pengungkapan informasi akuntansi (Rahman, Putri, & Hidayat, 2024). Sektor publik pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, di mana akuntabilitas dan transparansi menjadi prioritas. Berdasarkan sumber yang menyatakan bahwa "sektor publik fokus pada pelayanan masyarakat dan memenuhi kebutuhan umum, sedangkan sektor privat berorientasi pada keuntungan dan nilai bisnis" terlihat adanya perbedaan mendasar yang mengarahkan kedua jenis organisasi dalam menyusun strategi keterlibatan pemangku kepentingan. Sebaliknya, pada sektor privat, pengungkapan akuntansi lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan strategis dan ekonomi. Manajer perusahaan menghadapi dilema antara kebutuhan transparansi untuk menjaga kepercayaan investor dan kebutuhan menjaga kerahasiaan informasi bisnis. Studi nasional terbaru mengungkapkan bahwa persepsi manajer terhadap risiko kompetitif dan tekanan pasar turut membentuk kebijakan pengungkapan perusahaan (Utami & Prakoso, 2024). Perbedaan ini turut mempengaruhi mekanisme pembuatan keputusan, sumber dana, serta cara menghadapi tekanan eksternal seperti peraturan pemerintah dan aspirasi masyarakat.

Penelitian ini didasari oleh pemahaman bahwa strategi keterlibatan pemangku kepentingan tidak bersifat universal dan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor. Di sektor privat, strategi seperti program loyalitas pelanggan, hubungan investor, dan kolaborasi dengan rantai pasokan merupakan hal yang sering diterapkan guna memaksimalkan nilai bisnis. Di sisi lain, sektor publik mengutamakan keterlibatan melalui konsultasi publik, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan kerjasama lintas lembaga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan internal dan eksternal dalam lingkungan organisasi.

Selain itu, perkembangan digital dan meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) semakin menuntut kedua sektor untuk beradaptasi secara strategis. Seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan platform digital sebagai sarana interaksi dengan pemangku kepentingan juga menjadi tren yang semakin signifikan. Di sinilah peran teori pemangku kepentingan, seperti yang dikemukakan oleh Ed Freeman, menjadi sangat relevan. Freeman menekankan bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari keuntungan finansialnya, melainkan juga dari sejauh mana organisasi tersebut mampu memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai perbedaan mendasar antara sektor publik dan privat, serta bagaimana masing-masing mengelola nilai pemangku kepentingan, adalah sangat penting untuk mengembangkan kerangka kerja yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tantangan tersebut melalui analisis komparatif yang menyeluruh.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama sebagai berikut. Menelaah dan membedah strategi keterlibatan yang diterapkan oleh perusahaan di sektor publik dan privat, serta bagaimana strategi tersebut disesuaikan dengan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan. Mengungkap perbedaan mendasar dalam tujuan, mekanisme pengambilan keputusan, sumber dana, dan akuntabilitas antara sektor publik dan privat, dan bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi manajemen nilai pemangku kepentingan. Menilai efektivitas dari strategi keterlibatan yang diterapkan, termasuk dampaknya terhadap penciptaan nilai jangka panjang, baik dari segi keuangan, sosial, maupun lingkungan. Menyusun rekomendasi berbasis temuan penelitian untuk membantu organisasi, baik publik maupun privat, dalam meningkatkan kinerja manajemen nilai pemangku kepentingan di era digital dan globalisasi

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka ini membahas empat aspek utama yang mendasari penelitian, yaitu teori pemangku kepentingan, perbedaan antara sektor publik dan privat, strategi keterlibatan pemangku kepentingan, dan proses penciptaan nilai.

Teori Pemangku Kepentingan

Teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) merupakan landasan teoretis yang menekankan pentingnya mempertimbangkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam sebuah organisasi, bukan hanya para pemegang saham. Menurut sumber "Stakeholder Theory: Definition & Framework The Workstream", teori ini mengkategorikan pemangku kepentingan ke dalam kelompok primer dan sekunder, di mana kelompok primer meliputi karyawan, pelanggan, investor, dan pemasok, sedangkan kelompok sekunder mencakup komunitas, pemerintah, dan media.

Ed Freeman, melalui bukunya "Strategic Management: A Stakeholder Approach", menyoroti bahwa organisasi terbaik adalah organisasi yang mampu melayani berbagai kepentingan, mulai dari karyawan hingga masyarakat luas. Freeman berpendapat bahwa nilai jangka panjang tercipta ketika semua pemangku kepentingan mendapatkan manfaat dari kinerja organisasi. Filosofi ini mendasari pergeseran paradigma dalam manajemen modern, di mana pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial dianggap saling terkait.

Perbedaan Antara Sektor Publik dan Privat

Perbedaan mendasar antara sektor publik dan sektor privat sangat mempengaruhi cara-cara mereka mengelola nilai pemangku kepentingan. Sektor publik pada dasarnya bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan umum; oleh karena itu, tunduk pada aturan dan akuntabilitas yang lebih tinggi terhadap masyarakat dan pemerintah. Sementara itu, sektor privat berorientasi pada pencapaian keuntungan maksimal bagi pemegang sahamnya, dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan fokus pada inovasi untuk mendukung keunggulan kompetitif. Studi oleh Pratama dan Dewi (2023) mengungkapkan bahwa manajer sektor privat cenderung memilih strategi

pengungkapan selektif dengan menonjolkan informasi yang memberikan sinyal kinerja positif kepada pasar.

Pengungkapan akuntansi di sektor publik dan sektor privat menunjukkan perbedaan orientasi yang kuat karena dipengaruhi oleh konteks institusional masing-masing sektor. Di sektor publik, pengungkapan lebih diarahkan untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas kepada masyarakat dan lembaga pengawas, sementara di sektor privat pengungkapan cenderung diposisikan sebagai bagian dari strategi komunikasi korporasi. Perbedaan ini menegaskan bahwa lingkungan institusional, termasuk tujuan organisasi dan tekanan eksternal, memainkan peran penting dalam membentuk perilaku pengungkapan akuntansi (Hapsari & Kurniawan, 2023).

Dari sisi pendanaan, sektor publik mengandalkan dana yang bersumber dari pajak dan pinjaman publik, sedangkan sektor privat mendapatkan pendanaan dari penjualan, investasi, dan modal ventura. Proses pengambilan keputusan pun berbeda: sektor publik dipengaruhi oleh kebijakan politik dan kepentingan publik, sementara sektor privat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan profitabilitas. Persamaan keduanya terletak pada penggunaan prinsip transparansi, adanya regulasi, dan tuntutan efisiensi operasional.

Strategi Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Strategi keterlibatan pemangku kepentingan menunjukkan variasi signifikan antara sektor publik dan privat. Pada sektor privat, strategi yang umum diterapkan meliputi:

- 1 Pendekatan Berorientasi Pelanggan: Program loyalitas, peningkatan pengalaman pelanggan, dan pengelolaan hubungan melalui teknologi digital.
- 2 Hubungan Investor dan Karyawan: Strategi untuk membangun kepercayaan dan mempertahankan investasi melalui komunikasi yang jelas dan kontinuitas dalam penyampaian informasi.
- 3 Kolaborasi dengan Rantai Pasokan: Partnering dengan pemasok dan distributor guna mengoptimalkan efisiensi operasional dan mempertahankan standar kualitas.

Sementara itu, sektor publik cenderung menerapkan strategi berikut:

- 1 Konsultasi Publik: Melibatkan masyarakat melalui forum, dengar pendapat, dan pertemuan publik untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
 - 2 Transparansi dan Akuntabilitas: Pengungkapan informasi secara terbuka melalui portal publik dan rapat dewan, serta pelaporan reguler kepada publik.
 - 3 Kolaborasi Antar Lembaga: Mengoptimalkan sinergi antar instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mengatasi masalah yang kompleks.
- Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua sektor menghadapi tantangan serupa, model keterlibatan yang diterapkan disesuaikan dengan karakteristik, prioritas, dan konteks operasional masing-masing.

Proses Penciptaan Nilai Untuk Pemangku Kepentingan

Proses penciptaan nilai di dalam sebuah organisasi tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, melainkan juga melibatkan dimensi sosial dan lingkungan. Studi “Enhancing Stakeholder Value: Managerial Activities in the MDPI” mengemukakan bahwa aktivitas manajerial yang terstruktur, seperti diversifikasi pemasok dan pembeli, pengamanan saluran komunikasi, serta evaluasi umpan balik, merupakan elemen penting dalam mendukung proses penciptaan nilai.

Dalam konteks sektor privat, nilai tercipta melalui sinergi antara strategi bisnis, inovasi produk dan layanan, serta pengembangan hubungan yang erat dengan berbagai pihak. Sedangkan di sektor publik, penciptaan nilai lebih berfokus pada dampak sosial dan

peningkatan kualitas layanan publik. Kedua pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi teknologi digital untuk memperlancar komunikasi dan meningkatkan efisiensi proses internal.

Secara keseluruhan, pengelolaan nilai pemangku kepentingan merupakan hasil interaksi antara strategi bisnis, kebijakan organisasi, dan dinamika eksternal

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali serta menganalisis strategi manajemen nilai pemangku kepentingan secara komparatif antara sektor publik dan privat. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami konteks, makna, serta dinamika strategi yang digunakan oleh masing-masing sektor dalam upaya menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur sistematis yang mencakup berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber data utama berasal dari artikel, makalah penelitian, dan panduan praktis yang membahas strategi keterlibatan pemangku kepentingan di sektor publik dan privat, teori pemangku kepentingan serta pendekatan Freeman dalam menciptakan nilai bagi semua pihak, perbedaan dan persamaan antara sektor publik dan privat dalam aspek pengelolaan, sumber dana, serta akuntabilitas, serta aktivitas manajerial dalam menciptakan nilai melalui proses kolaboratif dan komunikasi yang efektif. Selain itu, data juga dilengkapi dengan dokumen panduan penyusunan laporan penelitian sebagai pedoman struktur dan tata cara penulisan ilmiah. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik dan konten, dimulai dari pengidentifikasian tema-tema kunci dari setiap sumber yang relevan, kemudian pengelompokan data berdasarkan kategori seperti strategi keterlibatan, perbedaan sektoral, dan proses penciptaan nilai, serta diakhiri dengan interpretasi dan penafsiran data secara mendalam untuk mengaitkan temuan dengan kerangka teoretis yang telah ada. Melalui pendekatan analisis ini, peneliti memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika manajemen nilai pemangku kepentingan dengan tetap mempertimbangkan konteks spesifik masing-masing sektor. Untuk menjaga kualitas penelitian, validitas dan reliabilitas dilakukan melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber dan referensi literatur. Seluruh data yang dianalisis diverifikasi dengan mengacu pada potongan informasi yang telah dipublikasikan dalam sumber-sumber terpercaya, sehingga proses verifikasi tersebut meningkatkan keakuratan interpretasi dan memastikan bahwa analisis yang dilakukan mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis komparatif beserta pembahasan mendalam mengenai manajemen nilai pemangku kepentingan di sektor publik dan privat. Hasil penelitian diuraikan melalui beberapa sub-bagian yang mencakup analisis tematik, tabel perbandingan, serta diagram proses keterlibatan pemangku kepentingan.

Analisis Komparatif Manajemen Nilai Pemangku Kepentingan

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam pendekatan manajemen nilai pemangku kepentingan antara sektor publik dan sektor privat. Secara umum, sektor privat cenderung mengutamakan kinerja finansial dan efisiensi operasional, di mana strategi keterlibatan diarahkan pada peningkatan loyalitas pelanggan, hubungan investor, serta kolaborasi dengan pemasok guna mendukung keunggulan kompetitif. Sedangkan sektor publik memprioritaskan penciptaan nilai sosial melalui transparansi, konsultasi publik, serta akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat dan pemerintah.

Perbedaan mendasar ini tercermin dari:

- 1 Tujuan Organisasi:
 - a. Sektor Privat: Memaksimalkan keuntungan dan menciptakan nilai bagi pemegang saham.
 - b. Sektor Publik: Menyediakan pelayanan optimal kepada masyarakat dan menjamin kepentingan publik.

- 2 Mekanisme Pendanaan:
 - a. Sektor Privat: Mengandalkan pendanaan internal dari penjualan produk dan investasi luar.
 - b. Sektor Publik: Menggunakan dana yang bersumber dari pajak, anggaran negara, dan pinjaman publik.
- 3 Pengambilan Keputusan:
 - a. Sektor Privat: Diambil berdasarkan analisis risiko, pasar, dan potensi pertumbuhan.
 - b. Sektor Publik: Dipengaruhi oleh kebijakan politik, regulasi, dan aspirasi masyarakat.
- 4 Tingkat Akuntabilitas:
 - a. Sektor Privat: Bertanggung jawab kepada pemegang saham dan investor.
 - b. Sektor Publik: Harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum dan lembaga pengawas.

Tabel Perbandingan Strategi dan Karakteristik Sektor

Berikut adalah tabel perbandingan antara sektor publik dan privat dalam konteks manajemen nilai pemangku kepentingan:

Tabel 1. Perbandingan Strategi dan Karakteristik Sektor Publik dan Privat

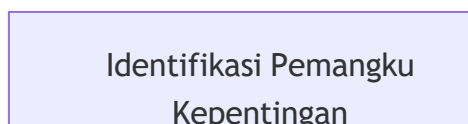
Aspek	Sektor Privat	Sektor Publik
Tujuan Utama	Memaksimalkan keuntungan dan nilai bagi pemegang saham	Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan umum
Sumber Dana	Penjualan, investasi, modal ventura	Pajak, anggaran pemerintah, pinjaman publik
Pengambilan Keputusan	Berbasis analisis pasar, risiko, dan efisiensi	Dipengaruhi oleh kebijakan politik, kepentingan publik dan regulasi
Akuntabilitas	Terhadap pemegang saham dan investor	Terhadap masyarakat, pemerintah, dan auditor eksternal
Pendekatan Keterlibatan	Program loyalitas, hubungan investor, kolaborasi rantai pasokan	Konsultasi publik, transparansi, kerjasama lintas lembaga
Fleksibilitas Organisasi	Cenderung lebih cepat dalam proses inovasi dan respons pasar	Terikat oleh birokrasi dan regulasi yang lebih ketat

Tabel di atas menyajikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan mendasar antara kedua sektor. Meskipun kedua sektor menghadapi tekanan untuk meningkatkan nilai keseluruhan, pendekatan dan prioritas mereka berbeda sesuai dengan tujuan dan lingkup operasional masing-masing.

Diagram Alir Proses Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Untuk memvisualisasikan proses keterlibatan pemangku kepentingan di kedua sektor, berikut adalah diagram alur yang menggambarkan tahapan mulai dari identifikasi pemangku kepentingan hingga evaluasi hasil keterlibatan:

Diagram 1: Alur Proses Keterlibatan Pemangku Kepentingan



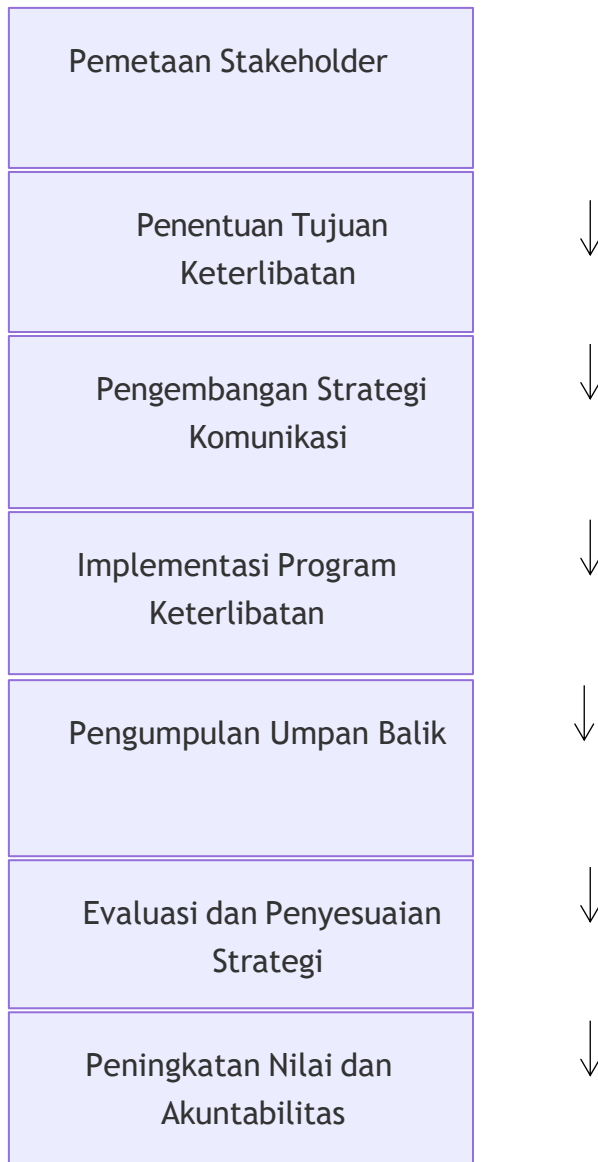


Diagram menjelaskan langkah-langkah utama dalam proses keterlibatan pemangku kepentingan yang diterapkan oleh kedua sektor. Sementara sektor privat lebih menekankan pada kecepatan dan fleksibilitas, sektor publik menekankan pada partisipasi luas dan transparansi.

Diskusi Mendalam dan Implikasi Temuan

Analisis komparatif menunjukkan bahwa strategi keterlibatan pemangku kepentingan disesuaikan dengan karakteristik operasional dan tujuan masing-masing sektor. Hal ini menyebabkan perbedaan signifikan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Fokus Strategis dan Prioritas:

Sektor privat cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dan inovatif dalam meningkatkan nilai melalui kolaborasi dengan pelanggan dan pemasok. Di sisi lain, sektor publik lebih banyak berfokus pada transparansi, partisipasi masyarakat, dan konsultasi publik yang intens guna memastikan akuntabilitas.

2 Peranan Teknologi Digital:

Penerapan teknologi digital telah menjadi pendorong utama dalam mengoptimalkan keterlibatan pemangku kepentingan di kedua sektor. Platform digital memungkinkan peningkatan komunikasi, pengumpulan umpan balik secara real-time, dan analisis data untuk evaluasi kinerja. Dalam sektor privat, teknologi digunakan untuk menciptakan hubungan yang lebih personal dan

tepat sasaran, sedangkan sektor public memanfaatkannya untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.

3 Evaluasi dan Respons terhadap Umpan Balik:

Kedua sektor menyadari pentingnya evaluasi berkelanjutan sebagai bagian dari proses keterlibatan. Namun, mekanisme evaluasi di sektor publik sering kali melibatkan berbagai lembaga pengawas dan dewan masyarakat, sehingga respon dan penyesuaian strategi mungkin berjalan lebih lambat dibandingkan sektor privat yang memiliki ruang lingkup keputusan yang lebih cepat dan terpusat.

4 Implikasi terhadap Penciptaan Nilai Jangka Panjang:

Penciptaan nilai bagi pemangku kepentingan tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan, tetapi juga pada reputasi, keberlanjutan, dan hubungan jangka panjang. Di sektor privat, nilai yang dihasilkan sering kali diukur melalui indikator kinerja finansial dan pertumbuhan pasar. Sementara di sektor publik, keberhasilan diukur melalui peningkatan kualitas layanan, kepuasan masyarakat, dan dampak sosial yang positif. Implikasi temuan ini menunjukkan bahwa meskipun metode dan indikator yang digunakan berbeda, kedua sektor memerlukan pendekatan yang holistik untuk mencapai tujuan strategis mereka.

5 Tantangan dan Peluang:

Baik sektor publik maupun sektor privat menghadapi tantangan dalam mempertahankan relevansi dan efektivitas strategi keterlibatan. Pada sektor privat, tekanan pasar, persaingan global, dan inovasi teknologi menjadi tantangan yang harus diatasi. Sedangkan pada sektor publik, tantangan muncul dari birokrasi, keterbatasan anggaran, dan dinamika politik yang kompleks. Namun, kedua sektor juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan sinergi melalui integrasi teknologi dan kolaborasi lintas sektor, sehingga dapat menciptakan nilai yang lebih besar bagi seluruh pemangku kepentingan.

5. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen nilai pemangku kepentingan merupakan aspek yang kritical sekaligus kompleks yang perlu dikelola secara strategis oleh organisasi, baik pada sektor publik maupun sektor privat. Pada dasarnya, meskipun kedua sektor sama-sama memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan untuk menciptakan nilai, terdapat perbedaan mendasar yang memengaruhi cara strategi tersebut dirancang dan dijalankan. Pertama, perbedaan tujuan dan orientasi menjadi faktor utama: sektor privat cenderung menitikberatkan pencapaian keuntungan dan peningkatan nilai finansial, sedangkan sektor publik lebih berfokus pada pelayanan masyarakat serta akuntabilitas sosial. Kedua, mekanisme pendanaan dan proses pengambilan keputusan yang berbeda menghasilkan konsekuensi signifikan terhadap penerapan strategi keterlibatan, karena setiap sektor memiliki karakter institusional dan batasan operasional yang tidak sama. Ketiga, strategi keterlibatan yang digunakan juga menunjukkan perbedaan: sektor privat lebih mengandalkan pendekatan berorientasi pasar seperti program loyalitas dan hubungan investor, sementara sektor publik lebih menekankan transparansi serta partisipasi publik sebagai wujud tanggung jawab sosialnya. Keempat, pemanfaatan teknologi digital terbukti menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas keterlibatan pada kedua sektor, misalnya dalam memperkuat komunikasi dan mempercepat akses informasi. Kelima, evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan serta kemampuan organisasi untuk beradaptasi menjadi faktor penting agar nilai yang diciptakan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi benar-benar mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang.

6. REFERENSI

- Anwar, R., & Safitri, D. (2023). Karakteristik manajer dan implikasinya terhadap keputusan akuntansi perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 145–160.
- Firmansyah, A. (2024). Akuntansi sebagai praktik sosial: Perspektif interpretatif dalam pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 33–48.
- Hapsari, P. N., & Kurniawan, D. (2023). Konteks institusional dan praktik pengungkapan akuntansi pada organisasi publik dan privat. *Jurnal Akuntansi Publik Indonesia*, 5(1), 21–36.
- Harahap, S. S. (2020). *Teori akuntansi (Edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusuma, H., & Rahayu, S. (2024). Pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan pengungkapan akuntansi. *Jurnal Akuntansi dan Tata Kelola*, 8(1), 1–14.
- Lestari, S., & Wijayanti, R. (2024). Tekanan regulasi dan perilaku pelaporan keuangan sektor publik. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 7(2), 85–99.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2021). *Sistem akuntansi (Edisi 6)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pratama, A. D., & Dewi, M. K. (2023). Strategi pengungkapan informasi keuangan dan sinyal pasar pada perusahaan sektor privat. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 15(2), 101–116.
- Rahman, A., Putri, D. A., & Hidayat, R. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan pada organisasi sektor publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 21(1), 45–60.
- Saputra, A., Priadi, E., & Rustamaji (2024). Analysis Of Slope Stability Due to Illegal Gold Mining In Bengkayang Regency *Jurnal Teknik Sipil*, 24 (1) 766-777
- Sari, M. P., & Nugroho, A. S. (2023). Pengungkapan akuntansi dan tata kelola organisasi: Perspektif sektor publik dan privat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(2), 210–225.
- Sembiring, R., & Hartono, J. (2024). Budaya organisasi dan transparansi pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 21(2), 167–182.
- Situmorang, D., M et.al”Analysis Of Accounting Knowledge Behavior and Accounting Recording on Revenue with Cultural Behavior Moderating Variable” *Al-Mal: Journal Of Islamic Accounting and Finance [ONLINE] Volume 05 Number 02 (Des 31, 2024)*
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, R., & Prakoso, B. (2024). Persepsi manajer terhadap pengungkapan informasi keuangan pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 16(1), 1–15.
- Wibowo, E., & Lestari, S. (2023). Faktor institusional dalam pengungkapan laporan keuangan sektor publik. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 89–102
- Yuliana, E., & Nugraha, R. (2023). Kebijakan pengungkapan akuntansi berbasis konteks sektor organisasi. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 34(3), 201–215.